

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan terhadap cara organisasi berinteraksi dengan publik. Kemajuan internet, perangkat digital, serta berbagai platform media sosial memungkinkan proses penyebaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya (Jamalullail et al., 2023). Masyarakat tidak lagi bergantung pada media konvensional sebagai sumber utama informasi karena akses terhadap berbagai informasi dapat diperoleh melalui perangkat digital yang digunakan sehari-hari (Ulayya et al., 2022). Perubahan tersebut mendorong berbagai organisasi untuk menyesuaikan strategi komunikasinya agar mampu menjangkau khalayak secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik media yang terus berkembang (Maulani et al., 2024).

Komunikasi publik memiliki peran strategis pada penyelenggaraan pemerintahan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai kebijakan, program, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Quesenberry, 2021). Informasi yang disampaikan kepada masyarakat perlu dikemas secara jelas agar dapat dipahami oleh berbagai kelompok khalayak. Kualitas komunikasi publik yang baik juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Kusuma et al., 2024). Oleh sebab itu, kemampuan pemerintah untuk mengelola komunikasi publik menjadi salah satu aspek yang semakin diperhatikan seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat (Maulani et al., 2024).

Peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial turut mendorong perubahan pola konsumsi informasi masyarakat (Hansson & Depaula, 2025). Berbagai platform media sosial berkembang menjadi sarana yang juga untuk memperoleh informasi mengenai isu sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan pemerintah. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat menjadikannya sebagai salah satu kanal komunikasi yang banyak dimanfaatkan oleh organisasi, termasuk instansi pemerintah (Tench & Yoemans, 2024). Melalui media sosial, informasi dapat disampaikan kepada khalayak yang lebih luas tanpa dibatasi oleh wilayah geografis maupun waktu penyebaran informasi (Maulvi et al., 2023).

Pemanfaatan media sosial pada sektor pemerintahan terus mengalami peningkatan karena platform tersebut mampu mendukung pelaksanaan komunikasi publik yang lebih interaktif (Kumalasari et al., 2024). Kehadiran fitur komentar, *likes*, *shares*, dan berbagai bentuk interaksi digital lainnya memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan terhadap informasi yang disampaikan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung tidak lagi bersifat satu arah, melainkan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat (Aji et al., 2024). Pola komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong instansi pemerintah untuk mengembangkan strategi komunikasi digital yang mampu menghasilkan informasi yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh publik.

Penyampaian informasi pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari pelaksanaan komunikasi publik pemerintah (Gregory, 2020). Masyarakat membutuhkan informasi mengenai hasil pembangunan yang telah dicapai, serta pemahaman mengenai proses pelaksanaan, manfaat yang dihasilkan (Hansson & Depaula, 2025).. Informasi yang disampaikan secara jelas dan mudah dipahami dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi publik terhadap berbagai program pembangunan yang sedang berlangsung (Zharfan et al., 2024).

Kebutuhan terhadap komunikasi publik yang efektif menjadi semakin penting seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (Zharfan et al., 2024). Akses informasi yang semakin mudah membuat masyarakat memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap transparansi penyelenggaraan pembangunan (Yashinta et al., 2023). Kondisi tersebut menuntut instansi pemerintah untuk mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Oleh karena itu, komunikasi publik berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Komunikasi publik memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang relevan, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan (Zharfan et al., 2024). Penyampaian informasi yang dilakukan secara konsisten dapat membantu masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan perkembangan berbagai program pemerintah. Informasi yang disampaikan juga perlu

disusun dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda (Yashinta et al., 2023). Upaya tersebut juga berkontribusi terhadap pembentukan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah karena informasi yang diterima bersifat terbuka, akurat, dan mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, komunikasi publik yang dikelola dengan baik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan serta meningkatkan keterlibatan publik terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Kementerian Pekerjaan Umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur nasional (Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, 2024). Berbagai program yang dijalankan oleh kementerian ini berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, penyediaan infrastruktur permukiman, hingga pengembangan sarana pendukung konektivitas wilayah. Luasnya cakupan tugas tersebut menjadikan komunikasi publik sebagai salah satu unsur yang mendukung penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat agar manfaat program pemerintah dapat diketahui secara luas (Maulvi et al., 2023).

Salah satu unit kerja yang memiliki peran penting pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional adalah Direktorat Jenderal Bina Marga. Unit kerja ini bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi tulang punggung konektivitas antar daerah di wilayah Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Banyaknya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan menghasilkan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat melalui proses komunikasi publik yang terencana. Informasi mengenai pembangunan jalan nasional, preservasi jalan, pembangunan jembatan, maupun berbagai program strategis lainnya memerlukan dukungan publikasi yang baik agar masyarakat memperoleh pemahaman yang memadai mengenai peran dan kontribusi Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap pembangunan nasional (Ernungtyas et al., 2024).

Direktorat Jenderal Bina Marga memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai sarana komunikasi publik untuk menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, serta capaian pembangunan infrastruktur (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025). Penggunaan media sosial memungkinkan informasi yang sebelumnya hanya dapat

diakses melalui media tertentu menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat (Kumalasari et al., 2024). Keberadaan media sosial juga mendukung penyebaran informasi secara lebih cepat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi terkini mengenai berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pengelolaan media sosial pada instansi pemerintah memerlukan proses yang terstruktur agar informasi yang disampaikan mampu mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan. Proses tersebut meliputi perencanaan konten, penyusunan pesan, dokumentasi kegiatan, produksi materi publikasi, hingga penyebaran informasi melalui platform digital (Quesenberry, 2021). Setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa informasi yang dipublikasikan menjadi akurat, menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pengelolaan konten yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan serta memperluas jangkauan informasi kepada publik (Hansson & Depaula, 2025).

Tahapan pengelolaan konten tidak berhenti setelah proses publikasi dilakukan. Konten yang telah dipublikasikan perlu dievaluasi melalui pengamatan terhadap respons audiens sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan konten berikutnya. Pengelolaan konten yang dilakukan secara berkesinambungan dapat membantu meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, memperluas jangkauan informasi, serta memperkuat hubungan antara instansi pemerintah dan masyarakat melalui media sosial (Hansson & Depaula, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan media sosial menjadi salah satu unsur penting yang mendukung pelaksanaan komunikasi publik pada era digital.

Program kerja magang menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis sekaligus mengembangkan kemampuan profesional yang relevan dengan bidang ilmu yang dipelajari. Dalam konteks ini, keterlibatan mahasiswa pada aktivitas publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan media digital memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan secara langsung mata kuliah seperti *Social Media & Mobile Marketing Strategy* dalam riset tren dan pengelolaan kanal digital, *Art, Copywriting & Creative Strategy* dalam penyusunan pesan dan naskah kreatif, *Media Planning & The Consumer Journey* dalam perencanaan konten dan evaluasi respons audiens, serta *Creative Media Production* dalam produksi dan penyuntingan konten visual (Taolin et al., 2025). Pengalaman tersebut tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan teknis yang berkaitan dengan produksi dan pengelolaan konten, tetapi juga memperluas

pemahaman mengenai peran komunikasi publik pada instansi pemerintah. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan profesional setelah menyelesaikan pendidikan tinggi (Aksa, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan salah satu instansi yang relevan sebagai tempat pelaksanaan kerja magang bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Aktivitas komunikasi publik yang dijalankan melalui berbagai media digital memberikan kesempatan untuk memahami penerapan teori komunikasi pada lingkungan kerja pemerintahan, yang sangat selaras dengan cakupan keempat mata kuliah tersebut—mulai dari perencanaan pesan (sejalan dengan *Media Planning & The Consumer Journey*), produksi konten kreatif (sejalan dengan *Art, Copywriting & Creative Strategy* dan *Creative Media Production*), hingga distribusi serta pengukuran dampaknya di media sosial (sejalan dengan *Social Media & Mobile Marketing Strategy*). Melalui keterlibatan pada kegiatan publikasi, dokumentasi, serta pengelolaan konten media sosial, pemagang memperoleh pengalaman yang berkaitan dengan proses perencanaan pesan, produksi konten, hingga penyebaran informasi kepada masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi sarana pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi akademik sekaligus memberikan gambaran mengenai praktik komunikasi publik yang diterapkan oleh instansi pemerintah.

Pelaksanaan kerja magang di Direktorat Jenderal Bina Marga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai komunikasi publik, komunikasi digital, serta pengelolaan media sebagai sarana penyebaran informasi, yang selama ini telah dipelajari secara teoretis melalui mata kuliah-mata kuliah relevan tersebut. Pengalaman yang diperoleh selama kegiatan magang juga menjadi bekal untuk menghadapi dunia kerja yang semakin menuntut kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Oleh karena itu, laporan kerja magang ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilakukan serta sebagai dokumentasi pengalaman yang diperoleh selama mempelajari praktik komunikasi publik di Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya pada Direktorat Jenderal Bina Marga.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja

Maksud dari pelaksanaan kerja magang ini adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam memahami proses kerja komunikasi publik, khususnya pada kegiatan publikasi dan dokumentasi di lingkungan instansi pemerintah. Melalui kegiatan ini, penulis dapat menerapkan pengetahuan mengenai komunikasi, produksi konten, dan pengelolaan media sosial yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam situasi kerja yang nyata.

Adapun tujuan pelaksanaan kerja magang ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami alur kerja komunikasi publik digital di pemerintahan mulai dari perencanaan hingga evaluasi konten dengan mengaplikasikan Media Planning & The Consumer Journey dan Social Media & Mobile Marketing Strategy dalam menganalisis respons audiens sebagai bahan perbaikan komunikasi.
2. Mengasah keterampilan memproduksi konten visual dan menyederhanakan informasi teknis melalui penerapan Creative Media Production serta Art, Copywriting & Creative Strategy untuk menjawab tantangan penyampaian informasi pembangunan infrastruktur kepada masyarakat awam.
3. Melatih kemampuan profesional seperti kerja sama tim, komunikasi, dan adaptasi, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung publikasi instansi yang selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan pengembangan kompetensi di lingkungan kerja.

1.3 Deskripsi Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga dalam bidang publikasi dan dokumentasi. Kegiatan magang mencakup proses pengenalan lingkungan kerja, pelaksanaan tugas harian, koordinasi dengan supervisor, hingga penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik. Penjelasan mengenai waktu dan prosedur pelaksanaan kerja dijabarkan sebagai berikut.

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja

Berdasarkan catatan kegiatan harian magang, penulis melaksanakan kerja magang mulai 1 Agustus 2025 sampai dengan 19 Desember 2025. Kegiatan magang dilakukan pada hari kerja dengan jam kerja pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Selama periode tersebut, penulis menjalankan berbagai tugas yang berkaitan dengan pengelolaan konten

media sosial, seperti riset tren TikTok, brainstorming ide konten, penyusunan content plan, pembuatan script, shooting konten, dokumentasi kegiatan, editing video, pengunggahan konten, dan evaluasi performa konten yang telah dipublikasikan.

Dalam pelaksanaan magang, penulis berada di bawah arahan Riko Dwiputra selaku Ketua Tim Publikasi dan Dokumentasi. Arahan dari supervisor digunakan sebagai dasar dalam menyusun konsep konten, menentukan prioritas pekerjaan, melakukan review hasil pekerjaan, dan memastikan konten yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan komunikasi instansi.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja

Prosedur pelaksanaan kerja magang diawali dengan kegiatan briefing dan pengenalan bersama tim media sosial. Pada tahap awal, penulis melakukan observasi terhadap gaya konten TikTok akun instansi serta memahami karakter komunikasi yang digunakan dalam penyampaian informasi publik. Setelah memahami alur kerja dan kebutuhan konten, penulis mulai dilibatkan dalam riset tren media sosial, brainstorming ide konten, serta penyusunan content plan mingguan.

Pada tahap pelaksanaan, penulis mengerjakan tugas berdasarkan arahan supervisor dan kebutuhan tim. Proses kerja yang dilakukan meliputi pembuatan konsep konten, penulisan script, pengambilan footage, shooting video, dokumentasi kegiatan kantor maupun lapangan, editing video pendek, penyusunan caption, penjadwalan unggahan, serta pengunggahan konten. Hasil pekerjaan kemudian ditinjau bersama supervisor atau tim untuk mendapatkan masukan dan revisi sebelum dipublikasikan.

Selain menjalankan tugas produksi konten, penulis juga membantu evaluasi performa konten yang telah diunggah dan melanjutkan perencanaan konten untuk periode berikutnya. Pada tahap akhir pelaksanaan magang, penulis menyusun laporan magang berdasarkan pengalaman kerja, catatan kegiatan harian, serta hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama program berlangsung.